

KRITERIA KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**(Studi Kasus Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor
1/PNPS Tahun 1965)**

SKRIPSI

Oleh:

Putri Oktavia Siburian

201710115168



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kriteria Kebebasan Beragama dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Penetapan
Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS
Tahun 1965)

Nama Mahasiswa : Putri Oktavia Siburian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115168

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Fakultas : Hukum



Pembimbing 1

Pembimbing 2

Rahmat Saputra, SH, MH
NIDN. 0304058306

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI, MH
NIDN. 0321048002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kriteria Kebebasan Beragama dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus
Penetapan Presiden Republik Indonesia
Nomor 1/PNPS Tahun 1965)

Nama Mahasiswa : Putri Oktavia Siburian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115168

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 November 2021

Bekasi, 25 November 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Rahmat Saputra, SH, MH
NIDN. 0304058306

Penguji 1 : Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH
NIDN. 0326078902

Penguji 2 : Widya Romasindah Aidy, S.Psi, MH
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Oktavia Siburian
NPM : 201710115168
TTL : Bekasi, 23 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kriteria Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Putri Oktavia Siburian

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Oktavia Siburian
NPM : 201710115168
TTL : Bekasi, 23 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KRITERIA KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 November 2021
Yang membuat pernyataan



Putri Oktavia Siburian

ABSTRAK

Putri Oktavia Siburian. 201710115168. *Kriteria Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965)*

Melalui UUD NRI 1945, Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Salah satu konsekuensi pernyataan dirinya sebagai negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Namun selanjutnya, pemerintah dinilai mengambil langkah yang salah ketika menerbitkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang ketentuan di dalamnya bertentangan dengan perlindungan HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tertuang dalam Konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara normatif apakah Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 ini sudah memenuhi kriteria perundang-undangan yang memayungi secara penuh kebebasan beragama setiap warga negara di Indonesia secara keseluruhan. Analisis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari tahu apakah Penetapan Presiden ini menyalahi peraturan di atasnya atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan di Indonesia karena penjelasannya yang bersifat kabur dan mudah ditafsirkan secara serampangan oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, ada beberapa batasan-batasan yang diterapkan dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, serta upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut.

Kata kunci: hak asasi manusia, kebebasan beragama, Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965

ABSTRACT

Putri Oktavia Siburian. 201710115168. *Criteria for Freedom of Religion in Human Rights Perspective (Case Study on the Determination of the President of the Republic of Indonesia Number 1/PNPS 1965)*

Through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia expressly declares itself as a state of law. One of the consequences of being declared as state law is the protection of human rights for every citizen. However, the government considered having taken the wrong step when issuing the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 1/PNPS of 1965, the provisions which contradicted the protection of human rights related to freedom of religion and belief contained in the Constitution.

This study aims to test normatively whether the Presidential Decree No. 1/PNPS 1965 has met the criteria of legislation that fully covers the religious freedom of every citizen in Indonesia as a whole. This analysis uses normative juridical research and descriptive research methods that seek to find out whether this Presidential Decree violates the regulations above or not.

The results of this study indicate that the Presidential Decree of Indonesia Number 1/PNPS Year 1965 is no longer relevant to be applied in Indonesia because of its vague explanation and easy to interpret haphazardly by many irresponsible parties.

In addition, there are several limitations imposed on the exercise of freedom of religion and belief in Indonesia, as well as efforts that must be made by the government to guarantee these freedoms.

Keywords: *human rights, freedom of religion, Presidential Decree No. 1/PNPS 1965*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul KRITERIA KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terkhusus kepada bapak **Rahmat Saputra, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan bapak **Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H.** selaku Pembimbing II atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan, petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap isu dan kasus tentang pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Meski begitu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan banyak pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Noviriska, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Bekasi, 25 November 2021



Putri Oktavia Siburian
NPM. 201710115168

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	11
1.5.1. Kerangka Teoritis	11
1.5.2. Kerangka Konseptual	16
1.5.3. Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Teori Negara Hukum	18
2.2. Teori Hak Asasi Manusia.....	24
2.3. Teori Keadilan.....	27
 BAB III. METODE PENELITIAN	 34
3.1. Jenis Penelitian Hukum.....	34
3.2. Pendekatan Penelitian	35
3.3. Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
 BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	 42
4.1. Kriteria Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	42
4.2. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi dan Mencegah Terjadinya Perbuatan Penodaan Terhadap Agama Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965	68
 BAB V. PENUTUP.....	 75
5.1. Simpulan	75
5.2. Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA	 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Instrumen Nasional dan Internasional tentang <i>Forum Internum</i>	44
Tabel 2. Instrumen Nasional dan Internasional tentang <i>Forum Externum</i>	45



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women</i>
Demos	Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FPI	Front Pembela Islam
GAFATAR	Gerakan Fajar Nusantara
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICERD	<i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
Imparsial	Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Masyarakat Berkeadilan
JAI	Jemaah Ahmadiyah Indonesia
KH	Kiai Haji
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MGA	Mirza Ghulam Ahmad
MK	Mahkamah Konstitusi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NII KW-IX	Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX
NTB	Nusa Tenggara Barat
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBHI	Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Perda	Peraturan Daerah
PN	Pengadilan Negeri

PNPS	Penetapan Presiden
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUU	Perundang-Undangan
SAW	<i>Shalallaahu Alaihi Wassalaam</i>
SE	Surat Edaran
SKB	Surat Keputusan Bersama
Sipol	Sipil dan Politik
Tap MPR	Ketetapan MPR
TUN	Tata Usaha Negara
UNCRC	<i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“FROM ‘NOTHING’ TO BE ‘SOMETHING’”

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Seluruh masyarakat Indonesia yang sedang memperjuangkan penegakan Hak Asasi Manusia dalam hal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang dimilikinya.

